Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Membumikan Hukum Positif Indonesia Bercorak Hukum Islam

Make Indonesia Positive Law Printed With Islamic Law

Budi Sastra Panjaitan*

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

Diterima: April 2021; Disetujui: Oktober 2021; Dipublish: Oktober 2021

Abstrak

Hukum positif Indonesia bercorak hukum islam merupakan langkah dalam mewujudkan keindonesiaan dalam arti memiliki kepribadian dan rasa kebangsaan Indonesia, selain itu hukum positif Indonesia bercorak hukum islam juga memiliki tujuan mulia, yaitu menggapai keadilan. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui hubungan hukum positif Indonesia yang bercorak hukum islam dalam kaitannya dengan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pewujutan hukum positif Indonesia bercorak hukum islam justru sangat sejalan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Omnibus law merupakan peluang dalam mewujudkan hukum positif Indonesia bercorak hukum islam, khususnya dalam peningkatan status dan penyelarasan KHI dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, peluang dan tantangan ini harus dapat ditangkap bukan hanya oleh ahli hukum islam di Indonesia tetapi juga oleh Fakultas Syari'ah di Indonesia, bukan hanya Fakultas Syari'ah Negeri tetapi juga oleh Fakultas Syari'ah Swasta.

Kata Kunci: hukum positif, hukum islam, keadilan

Abstract

Indonesian positive law with Islamic law is a step in realizing Indonesianness in the sense of having an Indonesian personality and sense of nationality, besides that, Indonesian positive law with Islamic law also has a noble goal, namely achieving justice. The purpose of this study is to find out the relationship between Indonesian positive law which is characterized by Islamic law in relation to justice. The research method used is a normative legal research method. The realization of Indonesia's positive law with Islamic law is in fact very much in line with the first principle of Pancasila, namely Belief in One God. Omnibus law is an opportunity in realizing positive Indonesian law with Islamic law, especially in improving the status and aligning KHI with various sectoral laws and regulations, these opportunities and challenges must be captured not only by experts in Islamic law in Indonesia but also by the Faculty of Sharia. 'ah in Indonesia, not only by the State Syari'ah Faculties but also by the Private Syari'ah Faculties.

Keywords: positive law, Islamic law, justice

How to Cite: Sastra Panjaitan. B. (2021). Membumikan Hukum Positif Indonesia Bercorak Hukum Islam. *Doktrina: Journal of Law*. 4 (2): 137-150

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan belaka (*machtsstaat*), demikian tertulis di dalam hukum dasar tertulis (*basic law*) Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai sebuah negara hukum maka semua aktifitas kebangsaan dan kerakyatan harus dilandasi oleh hukum, bukan atas kekuasaan. Dalam rangka menegakan negara hukum, harus dirancang, dibuat dan disahkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis formal.

Pilihan terhadap negara hukum secara nyata tertulis di dalam UUD 1945, namun tidak terdapat keterangan lebih lanjut dalam pembukaan UUD 1945 sistem hukum apa yang akan dipakai oleh Indonesia, apakah hukum eropa kontinental, hukum *anglo saxon*, hukum adat atau hukum islam, begitu juga di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut sistem hukum apa yang kemudian dipakai oleh Indonesia.

Esensi nilai-nilai Pancasila yang autentik termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang meliputi: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan

Keadilan Sosial, telah dirumuskan dalam berbagai ketentuan bahwa hukum Indonesia dibangun dengan dasar Pancasila, penempatan Pancasila sebagai dasar negara dan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan karena memang telah disepakati oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sila pertama Pancasila mengatur perihal “Ketuhanan Yang Maha Esa”, frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengindikasikan bukan hanya Indonesia mengakui adanya Tuhan, tetapi lebih dari itu adalah peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan disahkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersendikan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya (kemerdekaan) bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalandengan makna Alinea III Pembukaan UUD 1945.

Sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan Bangsa Indonesia ini wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat” (Paristiyanti Nurwardani et.al., 2016).

Menarasikan hukum berarti sama dengan menarasikan kebenaran. Menarasikan kebenaran berarti sama juga menarasikan keadilan. Keadilan lahir dari kebenaran, dalam hal ini kebenaran yang dapat diuji berdasarkan ketentuan hukum-hukum Allah. Bagaimana meletakkan keadilan pada semua aktifitas manusia parameternya adalah kebenaran. Islam mewajibkan untuk mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. “Keadilan lebih dititikberatkan kepada meletakkan sesuatu pada tempatnya”. (Zamakhsyari, 2013).

“Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai

pihak yang terkait”. (Juhaya S. Praja, 2013).

Hukum islam bukan sekedar sistem hukum, hukum islam merupakan jalan yang menghantarkan manusia untuk mendapatkan maslahat duniawi dan ahirah. Setiap ummat yang melaksanakan hukum islam bukan hanya sekedar mendapatkan keadilan dan kemanfaatan duniawi, tetapi lebih dari itu adalah kebaikan dan kemanfaatan ahirah. “Keadilan sebagai gagasan tertinggi dan mulia di dalam hukum, merupakan kehendak-Nya yang dijalankan oleh manusia yang mengemban amanah-Nya”.(Syaiiful Bakhri, 2017).

Beda dengan sistem hukum lainnya yang hanya menghantarkan kepada keadilan dan kemanfaatan duniawi, disinilah bedanya hukum islam dengan sistem hukum lainnya. Dengan bahasa lain dapat dinarasikan hukum islam memiliki dimensi duniawi dan ahirah, sementara itu sistem hukum lainnya hanya memiliki dimensi duniawi belaka.

Dalam rangka mensyukuri kemerdekaan Bangsa Indonesia dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat, khususnya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, tulisan ini kemudian disemangati dengan nilai-nilai

Ketuhanan Yang Maha Esa yang akan membahas mempositifkan hukum positif Indonesia bercorak hukum islam mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum islam akan menjadi dorongan pokok (*leitmotive*) dan bintang penunjuk jalan (*leitstar*) bagi seluruh rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini disesuaikan dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. (Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001).

Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013).

Analisis data setelah menghasilkan data dikumpulkan secara normatif, maka selanjutnya dianalisis data dengan menggunakan cara metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus terhadap tujuan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Positif Bercorak Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Pancasila

Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Hal ini dapat dimaknai bahwa peraturan peninggalan Belanda masih tetap diberlakukan sepanjang belum dicabut, pemberlakuan tersebut berarti keberadaannya sementara waktu selama belum diadakan yang baru, tidak permanen, diadakan yang baru sebagai pengganti dengan berdasarkan kepada UUD 1945.

Beberapa peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda misalnya: Wetboek van Stafrecht, umum dikenal sebagai Kitap Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Burgerlijk Wetboek (Kitap Undang-Undang Hukum Perdata) atau biasa disebut KUH Perdata dan Wetboek van Koophandel (Kitap Undang-Undang Hukum Dagang) yang biasa disebut dengan nama KUHD, merupakan peraturan peninggalan Belanda yang masih berlaku sampai dengan sekarang. Padahal kitap tersebut sifatnya berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD

1945 adalah sementara waktu selama belum diadakan yang baru.

Dengan dasar Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 harus disusun hukum positif Indonesia yang benar-benar lahir dari rahim ibu pertiwi, hukum tersebut harus bersendikan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana kesepakatan utama para pendiri bangsa yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila. Dengan hukum yang bersendikan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan akhirnya adalah penciptaan keadilan yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa pula.

Bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin penegakan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Disinilah kemudian peluang ummat untuk membangun hukum positif Indonesia yang bercorakkan hukum islam, tujuannya adalah menggapai keadilan dalam jalan lurus, yaitu jalan Ihdinas Siratal Mustaqim, jalan yang harus diikuti oleh setiap orang. "Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan" (Rohidin, 2016).

Sejatinya, mempositifkan hukum positif Indonesia bercorak hukum islam adalah kewajiban bagi ummat islam, terlebih-lebih telah banyak ahli hukum islam yang dilahirkan dari Fakultas Syari'ah. Kita tidak ingin hanya melihat dan melaksanakan hukum positif yang belum tentu bercorak hukum islam, kita harus menjadi pemain utama dalam mewujudkan hukum positif Indonesia bercorak hukum islam.

Kita harus memberikan penghormatan yang tinggi terhadap pemikir dan pencetus serta pihak-pihak yang mendorong terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Tanpa mereka, mungkin tidak akan pernah terwujud KHI. Sebagai sebuah produk hukum, KHI memiliki esensi yang teramat bernilai dalam tata kehidupan hukum dan masyarakat islam Indonesia, penilaian tersebut didasari dari pemikiran sebagai berikut:

- a. Sebelum lahirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, sepengetahuan penulis belum pernah ada hukum positif Indonesia yang menggunakan kata "Islam" baik pada judul maupun isinya.

b. KHI merupakan tonggak awal terwujudnya hukum positif Indonesia yang bercorakkan hukum Islam.

Apakah kemudian dengan mempositifkan hukum positif Indonesia bercorak hukum islam lalu kita harus mengganti idiologi negara? Jawabannya tidak, idiologi tetap harus idiologi Pancasila, sebagai contoh misalnya berlakunya KHI tidak pula merubah idiologi Negara. "...ajaran Islam dapat diimplementasikan di Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai (value) Islam dalam kehidupan sosiologis masyarakat. Bukan melalui formalisasi ajaran dalam bentuk mendirikan Negara Islam" (Rahman Ambo Masse, 2015).

Penempatan Pancasila sebagai Idiologi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati yang tidak dapat dirubah oleh siapapun. Pancasila tidak hanya sekedar idiologi, tetapi juga Pancasila sebagai jati diri bangsa sekaligus sebagai identitas nasional (Paristiyanti Nurwardani, 2016).

Indonesia tetap beridiologikan Pancasila, yang terpenting adalah bagaimana membangun dan mempositifkan hukum Indonesia bercorakkan hukum islam, sehingga urgensi penegakan hukum yang berkeadilan benar-benar dapat terwujud,

bukan hanya untuk urusan duniawi, tetapi juga untuk urusan ahirat. "Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat" (Wati Rahmi Ria, 2018).

Adalah hal yang wajar jika kemudian diberlakukan hukum positif Indonesia bercorak hukum islam, mengingat penganut Agama Islam merupakan mayoritas di Indonesia. "Semangat syari'ah yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadist harus pula diakomodir dalam pembentukan UU" (Elfa Murdiana, 2016).

Dengan dipositifkannya hukum positif Indonesia yang bercorak hukum islam, keindonesiaan oleh warga negara (staatsburger) Indonesia dalam arti memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia akan menjadi lebih baik dan terdidik (smart and good citizen) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang demokratis.

Untuk mempositifkan hukum positif Indonesia bercorak hukum islam memang tidaklah mudah, terlebih-lebih terdapat pihak yang islamofobia, ketakutan dan kebencian kepada islam yang tidak berdasar dan tidak beralasan. Ketakutan itu kemudian diterjemahkan dan

dinarasikan dalam berbagai bentuk, seperti: hukum islam tidak adil, hukum islam tidak menghargai hak asasi manusia, pencuri harus dipotong tangan dan lain sebagainya. “Penerimaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat mengalami tantangan sejak masuknya Belanda” (Zaka Firman Aditya, 2019).

Semua kebijakan pemerintah Belanda tersebut, berhasil melemahkan posisi hukum islam dan sekaligus melemahkan posisi ummat muslim Indonesia secara terus menerus sampai menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia di tahun 1942” (Hendra Gunawan, 2018).

Tantangan ini harus dijawab dengan membuktikan hukum islam tidak sebagaimana prasangka buruk kaum islamofobia, hukum islam tidak hanya sekedar melindungi dan menghargai setiap manusia, tetapi hukum islam juga mengayomi dan memberikan keadilan yang sebenar-benarnya adil kepada siapapun, bukan hanya ummat islam. “Islam bisa mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat dan menentang feodalisme dengan berbagai nilai sosial dan ibadah umat Islam, seperti zakat, puasa, sholat, dll” (Rachmad K. Dwi Susilo, 2017).

“Islam bukan sekedar ajaran agama yang mengatur aqidah dan ibadah, tetapi juga akhlak dan mu’amalah dunyawiyah” (Haedar Nashir, 2015). Perkembangan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur’an.

Implikasinya pemenuhan hukum sebagai sebuah kebutuhan untuk mengatur manusia ditujukan untuk mewujudkan keadilan dengan tetap bersumber kepada hukum-hukum Allah. “Orang-orang yang menegakkan keadilan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam” (Nur Rofiah dan Imam Nahe’i, 2016).

Keadilan merupakan salah satu bukti keindahan dari islam. “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S. An-Nahl (16), 90).

Penyimpangan dari keadilan merupakan penyimpangan dari hukum Allah. Dunia diciptakan Allah bukan untuk tempat kebencian, kerusakan, kehancuran dan kekacauan. Kebencian justru akan mengakibatkan putusannya hubungan kasih kepada sesama manusia mahluk ciptaan

Allah, kebencian akan menimbulkan permusuhan yang melahirkan kehancuran. Penegakan keadilan merupakan kewajiban kepada Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, demikian diajarkan oleh Allah melalui Al-Qu'ran.

Penempatan hukum positif Indonesia yang bercorak hukum islam tidaklah kemudian membuat Indonesia punah, justru semakin menempatkan Indonesia semakin adil dunia dan ahirah. Dalam hukum islam, "perintah menunjukkan pada kewajiban dan larangan menunjukkan pada pengharaman" (Abdul Wahhab Khallaf, 2014).

Perintah dan larangan tersebut menunjukkan terdapat hubungan positif antara faktor duniawi dengan faktor ahirah, artinya bahwa setiap orang yang tunduk dan melaksanakan hukum islam menunjukkan selain ada hukum duniawi yang akan dihadapinya juga terdapat hukum ahirah yang tak kalah penting untuk dihadapi pula, larangan yang membawa makna pengharaman akan menjadi "kegaduhan batin" atas pelanggaran-pelanggarannya.

Mempositifkan hukum positif Indonesia yang bercorak hukum islam bukanlah hal yang mustahil, negara sebenarnya telah memberikan peluang

untuk itu, hal ini ditandai dengan diadakannya badan Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Sampai hari ini hanya ada beberapa hukum positif Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bercorak hukum islam, diantaranya adalah undang-undang wakaf, undang-undang surat berharga syaria'ah negara, undang-undang perbankan syariah, undang-undang zakat, undang-undang jaminan produk halal, undang-undang haji.

Masih sangat sedikit dan bersifat sektoral hukum positif Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bercorak hukum islam, pertanyaannya berikutnya adalah dengan dasar hukum apa kemudian Peradilan Agama memutus sengketa ekonomi syariah? Jawabannya tentunya dengan peraturan perundang-undangan yang ada, apakah kemudian dengan hukum positif yang bercorak hukum islam, hukum positif yang tidak bercorak hukum islam atau hukum positif peninggalan Belanda?

Mungkin karena kurangnya hukum positif sebagai sumber hukum acara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Peraturan Mahkamah Agung ini berisi: Buku 1: Subjek Hukum Dan Amwal, Buku II: Tentang Akad, Buku III: Zakat Dan Hibah, dan Buku IV: Akuntansi Syariah.

Lain lagi misalnya dalam praktek ditemukan: baitul maal wattanwil, koperasi syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, supermarket syari'ah, hotel syari'ah, pasar modal syari'ah, reksadana syari'ah dan lain sebagainya yang dikelola oleh anak bangsa untuk kemajuan ummat, dasar pembentuknya masih kepada peraturan perundang-undangan yang tidak bercorak hukum islam, seperti hukum positif Indonesia belum semua menjangkau bisnis dengan dasar syari'ah.

Bagaimana jadinya secara legalitas jika pembentukan badannya dengan hukum positif yang tidak bercorak syari'ah sementara itu isinya melaksanakan konsep syari'ah? Sepertinya ada gejala yang tidak bersesuaian atau dengan narasi lain dapat dinyatakan ada legalitas yang harus dicari kebenarannya antara badan dengan isinya.

Peningkatan Status dan Penyelarasan KHI

Seperti telah diurai sebelumnya, kita harus memberikan apresiasi positif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan KHI. Tanpa mereka tonggak awal untuk mempositifkan hukum Indonesia bercorak hukum islam mungkin hanya sekedar harapan yang sulit untuk diwujudkan, mereka telah mewujudkan perjuangan panjang yang melelahkan namun membuahkan hasil yang positif.

Dalam tata hukum Indonesia, pemberlakuan KHI dilakukan melalui Instruksi Presiden. Lahirnya Instruksi Presiden bukan dimaksudkan untuk mengatur kepentingan yang bersifat mengikat umum, tetapi Instruksi presiden dikeluarkan dengan maksud memberikan perintah dari atasan kepada bawahan yang bersifat individual, kongkrit dan sekali-selesai.

Keberadaan Instruksi Presiden tidak pula bersifat mengatur (*regeling*) maupun bersifat penetapan (*beschikking*), akibatnya kemudian Instruksi Presiden tidak tergolong sebagai peraturan perundang-undangan (*wetgeving*). Instruksi Presiden tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Instruksi presiden merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali-selesai (*final, einmahlig*) sehingga tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) atau peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*). (<https://www.indozone.id/news/WYsqEl/perbedaan-antara-keppres-perpres-dan-inpres>)

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Instruksi Presiden tidak dikenal sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jika kemudian dihubungkan “baju” KHI dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, terdapat kesimpulan bahwa baju KHI dalam bentuk Instruksi Presiden tidak dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.

Jika kemudian ditelisik lebih lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, perintah untuk menerbitkan Instruksi Presiden tersebut tidak dilandasi oleh peraturan perundang-undangan tertentu sebagai payung hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara legal isi Instruksi Presiden dimaksud tidak memiliki akar yang kuat sebagai landasan konstitusionalnya. Dengan demikian, dari sisi materi muatan, tidak terdapat peraturan perundang-undangan terkait yang mendelegasikan tindakan lanjut dalam bentuk Instruksi Presiden KHI.

Yang penting untuk dipahami oleh pembentuk peraturan perundang-undangan adalah mengenai materi muatan peraturan. Materi muatan terkait erat dengan jenis peraturan perundang-undangan dan terkait dengan pendelegasian pengaturan. Selain terkait dengan jenis dan delegasian, materi

muatan terkait dengan cara merumuskan norma. (Maria Farida, 2008).

Jikapun kemudian dihubungkan kembali Instruksi Presiden dimaksud dengan bagian “mengingat” yang mendasari kepada “Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945”, hal tersebut tidak menunjukkan sebagai payung hukum diterbitkannya Instruksi Presiden yang berisi KHI. “Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945” sebagaimana terdapat dalam bagian mengingat Instruksi Presiden tersebut hanya menunjukkan kepada “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, bukan menunjukkan kepada payung hukum untuk diterbitkan Instruksi Presiden yang berisi KHI.

Dalam perkembangan selanjutnya, Buku I KHI tentang hukum perkawinan justru dapat dikatakan tumpang tindih dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahkan KHI lebih lanjut juga kurang bersesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Begitu juga Buku III KHI tentang hukum perwakafan tumpang tindih dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Seperti uraian tersebut di atas, KHI dari hulu sampai dengan hilir mengalami distorsi dalam hubungannya dengan faktor legalitas.

Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan berlaku hierarki peraturan perundang-undangan. Penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terlepas dari baju KHI dalam bentuk Instruksi Presiden, jika kemudian disandingkan isi KHI dengan undang-undang sektoral, maka berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan beberapa ketentuan KHI tidak dapat lagi digunakan karena dianggap telah tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan berbagai argumentasi tersebut di atas, sudah seharusnya KHI ditingkatkan statusnya dan diselaraskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan selanjutnya dijadikan sebagai hukum positif Indonesia

bercorak hukum islam dalam bentuk undang-undang.

Peningkatan status dan penyelarasan KHI dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada justru akan menguntungkan kepada semua pihak. Paling tidak, melalui KHI baru versi undang-undang lahir hukum positif Indonesia yang bercorak hukum islam yang mengatur banyak kepentingan bagi siapa saja, bukan hanya sekedar kepada ummat Islam.

Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Berbagai kritik terhadap penegakan hukum tidak terlepas dari lemahnya program legislasi sehingga kualitas peraturan perundang-undangan menjadi tumpul. "Reformasi penegakan hukum merupakan jawaban terhadap bagaimana hukum di Indonesia diselenggarakan. (Lutfil Ansori, 2017).

Dalam berbagai kesempatan banyak kemudian pasal atau ayat dari undang-undang bahkan undang-undang yang dibatalkan keberlakuannya melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mereformasi dalam bidang hukum dapat dilakukan salah satunya dengan menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada,

sehingga peraturan perundang-undangan yang ada tidak lagi saling bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Program penyelarasan dan penyederhanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang sekarang sedang digagas oleh pemerintah adalah *omnibus law*. Melalui *omnibus law* akan dilakukan perampingan dan penyederhanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam sebuah undang-undang.

Tujuan *omnibus law* adalah agar tercapai kepastian hukum dan keadilan, banyak undang-undang justru melahirkan ketidak pastian, melahirkan ketidak tentraman dan melahirkan ketidak nyamanan serta melahirkan ketidak adilan, hal ini ditandai dengan banyaknya undang-undang sektoral yang saling sikut, saling bertentangan bahkan saling tidak bersesuaian yang pada ahirnya secara struktur melalaikan ketidakadilan.

Program *omnibus law* merupakan tantangan bagi ahli hukum islam Indonesia dan tentunya juga merupakan tantangan bagi Fakultas Syari'ah di Indonesia. Apakah kemudian kita mampu meresponnya secara positif atau tidak? Kesiapan sumber daya manusia yang berhubungan dengan hukum islam sudah

tidak perlu diragukan lagi, begitu juga kesiapan infra struktur dengan keberadaan Fakultas Syari'ah dari sabang sampai merauke telah ada.

Siapkah kita mewujudkan hukum positif Indonesia bercorak hukum islam? Ataukah kita hanya sekedar menjadi penonton di tanah muslim Indonesia? Agendanya adalah mewujudkan KHI versi baru dalam bentuk undang-undang yang tentunya telah diselaraskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada. KHI versi baru merupakan peluang yang dapat diwujudkan melalui *omnibus law*.

Kalau mau jujur, *omnibus law* yang pada saat sekarang sedang digadagadag oleh pemerintah dalam menata kembali peraturan perundang-undangan yang ada sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemikir-pemikir islam di Indonesia dengan pemberlakuan KHI.

Hanya persoalan nomenklatur saja yang berbeda, tetapi hakekatnya adalah sama. KHI mengatur banyak hal dalam satu baju "kompilasi" yaitu: Buku I tentang Hukum Perkawinan; Buku II tentang Hukum Kewarisan; dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Sementara itu *omnibus law* pada prinsipnya juga mengatur dan menyederhanakan berbagai

ketentuan yang ada dalam sebuah undang-undang.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka simpulan yang dapat ditarik adalah sudah seharusnya kita bergerak secara nyata dalam rangka mewujudkan hukum positif Indonesia yang bercorak hukum islam. Pewujutan hukum positif Indonesia bercorak hukum islam justru sangat sejalan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. *Omnibus law* merupakan peluang dalam mewujudkan hukum positif Indonesia bercorak hukum islam, khususnya dalam peningkatakan status dan penyelarasan KHI dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, peluang dan tantangan ini harus dapat ditangkap bukan hanya oleh ahli hukum islam di Indonesia tetapi juga oleh Fakultas Syari'ah di Indonesia, bukan hanya Fakultas Syari'ah Negeri tetapi juga oleh Fakultas Syari'ah Swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Zaka Firma (2019), Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, dalam Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 1, April
- Ansori Lutfil (2017), Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, dalam Jurnal Yuridis, Volume 4 No. 2, Desember

- Asshiddiqie Jimly (2010), Perihal Undang-Undang, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Bakhri Syaiful (2017), Konstelasi Filsafat Ilmu Dan Islam, Jakarta, UMJ Press,
- Farida Maria et.all. (2008), Laporan Kompedium Bidang Hukum Perundang-Undangan, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Gunawan Hendra (2018), Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia, dalam Jurnal Al-Maqasid, Vo. 4 No 1, Januari-Juni
- HS. Salim dan Nurbaini Erlies Septiana (2013), Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Masse Rahman Ambo (2015), Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah, Yogyakarta, Trust Media Publishing
- Nurwardani Paristiyanti et.all., (2016), Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Nurwardani Paristiyanti (2016), Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Khallaf Abdul Wahhab (2014), Ilmu Ushul Fiqih, Semarang, Dina Utama
- Murdiana Elfa (2016), Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (BMT) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum, Jurnal Penelitian Kudus, Volume 10, Nomor 2
- Nashir Haedar (2015), Gerakan Islam Pencerahan, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah
- Praja Juhaya S. (2013), Filsafat Hukum Islam, Tasikmalaya, Lathifah Press dan Fakultas Syari'ah IAILM Suryalaya
- Ria Wati Rahmi (2018), Hukum Perdata Islam, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja
- Rofiah Nur dan Nahe'i Imam (2016), Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam: Konsep Ideal Hudud Dan Praktiknya, Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- Rohidin (2016), Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji (2001), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Susilo Rachmad K. Dwi, et.all. (2017), Tantangan Sosial Politik Era Kekinian Kolaborasi Pemikiran Berbagai Perspektif, Yogyakarta, Gre Publishing
- Zamakhshari (2013), Terori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih, Bandung, Citapustaka Media Perintis
- Indozone.ID (2019), Perbedaan Antara Keppres, Perpres, dan Inpres, diunduh 5 Januari 2021 pada <https://www.indozone.id/news/WYsqEl/perbedaan-antara-keppres-perpres-dan-inpres>.